



Sekretaris Komisi A DPRD Kota Jogja, R. Candra Akbar Ishmata

Dukung Layanan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin

Sosok politisi muda R. Candra Akbar Ishmata diberi amanah sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Kota Jogja. Pada komisi yang fokus membidangi urusan pemerintahan dan hukum itu, dia mengapresiasi program layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin milik Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.



R. CANDRA AKBAR ISHMATA
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Jogja

CANDRA mengatakan, bantuan hukum memang sudah seharusnya bisa diakses oleh semua kalangan. Termasuk masyarakat miskin yang selama ini kesulitan dari segi biaya. Hal tersebut, juga merupakan bentuk implementasi sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Candra pun sangat mendukung adanya layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang diinisiasi oleh pemkot melalui Bagian Hukum Setda Kota Jogja itu. Lantaran program tersebut dapat memberikan perlindungan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dalam menghadapi permasalahan hukum.

"Bantuan hukum gratis merupakan bentuk nyata dari negara untuk hadir di tengah masyarakat. Sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan, tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi," ujar Candra, Kamis (14/11).

Politisi yang memiliki latar belakang pengacara dan pengusaha ini menilai, layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat

GRATIS: Sosialisasi pemberian bantuan hukum di Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Kota Jogja. Pemkot Jogja memberikan pelayanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Kota Jogja.



miskin Kota Jogja harus terus dilanjutkan. Bahkan perlu ada sosialisasi yang masif agar semakin banyak masyarakat miskin paham untuk mengakses program tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Jogja sudah menjalankan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin selama tiga tahun terakhir. Program tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum. Program tersebut

menyasar masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian juga wajib memiliki kartu menuju sejahtera, kartu Indonesia pintar atau surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. "Kami mendorong agar Pemkot Jogja terus berkomitmen meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, salah satunya layanan bantuan hukum," tegas Candra.

Di samping fokus terhadap

layanan hukum bagi masyarakat, politisi muda dari Partai Golkar ini juga akan mendorong berbagai program dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya pada lingkup pemerintahan tingkat bawah seperti RT dan RW.

Candra menilai, pengurus RT, RW dan Ketua Kampung memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah. Sebab mereka merupakan perangkat pemerintahan yang langsung

bersinggungan dengan masyarakat. Serta termasuk bagian dari masyarakat itu sendiri.

Dia mendorong agar Pemkot Jogja dapat memberi perhatian lebih kepada pengurus RT, RW dan Ketua Kampung di Kota Jogja. Khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan bagi mereka. "Jika pengurusnya sejahtera, maka masyarakatnya pun bisa sejahtera," tegas anggota dewan yang berangkat dari Dapil Kota Jogja 1 ini. (**/inu/pr/aby*)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 22 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005